

RINGKASAN

**SUHAILA
NIM 200510367**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENYEBARAN FOTO DAN
VIDEO PORNOGRAFI (Studi Penelitian di
Polres Kota Lhokseumawe)
(Husni, S.H., M.H. dan Nuribadah, S.H., M.H.)**

Kurangnya perlindungan hukum yang efektif bagi korban penyebaran foto dan video pornografi, seperti yang dialami oleh NA (22) di Lhokseumawe, yang menjadi korban ancaman dan penyebaran konten pornografi oleh mantan kekasihnya. Tindakan ini melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang distribusi konten bermuatan kesusilaan tanpa izin. Kendala teknis, seperti penggunaan teknologi untuk menyembunyikan identitas pelaku, memperumit penanganan kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polres Kota Lhokseumawe terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya, serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi para korban.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang dipilih secara *purposive sampling*, dengan sumber data primer dari wawancara dengan penyidik Unit Tipidter dan Unit PPA Polres Lhokseumawe. Lokasi penelitian di Polres Kota Lhokseumawe.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe dilaksanakan melalui penyelidikan, penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi digital seperti forensik dan pelacakan IP, sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 310 KUHP, serta Pasal 4 ayat (1), (2), dan Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Korban mendapat pendampingan hukum dan psikologis sejak awal oleh Unit PPA, bekerja sama dengan LPSK. Namun, penanganan kasus menghadapi kendala seperti kesulitan identifikasi pelaku akibat akun palsu, dan minimnya sarana forensik digital. Upaya Polres Lhokseumawe dalam melindungi korban mencakup pelatihan rutin, edukasi publik, serta penyediaan kanal pengaduan daring untuk menjamin privasi korban, dan perencanaan pembentukan tim khusus siber guna memperkuat penanganan kejahatan digital secara lebih terarah.

Saran yang dapat diberikan adalah agar pihak kepolisian dapat terus meningkatkan serta memperkuat sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi, guna memastikan penanganan kasus-kasus serupa lebih efektif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Foto, Video, Pornografi.

SUMMARY

SUHAILA
NIM 200510367

**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF
THE DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHIC
PHOTOS AND VIDEOS (Research Study at the
Lhokseumawe City Police)**
(Husni, S.H., M.H. and Nuribadah, S.H., M.H.)

The lack of effective legal protection for victims of the distribution of pornographic photos and videos, as experienced by NA (22) in Lhokseumawe, who became a victim of threats and the spread of pornographic content by her ex-boyfriend. This action violates Article 4, paragraph (1) of the Pornography Law and Article 27, paragraph (1) of Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE), which prohibits the distribution of immoral content without permission. Technical challenges, such as the use of technology to conceal the perpetrator's identity, complicate the handling of this case. This research aims to explore the form of legal protection provided by the Lhokseumawe City Police for victims of the distribution of pornographic photos and videos, identify the obstacles faced in the law enforcement process, and analyze efforts made to improve the effectiveness of legal protection for victims.

This study uses an empirical juridical method. Data were collected through interviews with respondents selected via purposive sampling, with primary data sources from interviews with investigators from the Tipidter Unit and the PPA Unit of the Lhokseumawe Police. The research location is the Lhokseumawe City Police.

The results of this study indicate that the legal protection for victims of the distribution of pornographic photos and videos at the Lhokseumawe City Police is carried out through investigations, law enforcement, and the use of digital technology such as forensics and IP tracking, in accordance with Article 45, paragraph (1) and Article 27, paragraph (1) of Law No. 1 of 2024 on ITE, Article 310 of the Criminal Code, and Article 4, paragraph (1), (2), and Article 8 of Law No. 44 of 2008 on Pornography. Victims receive legal and psychological assistance from the PPA Unit from the outset, in collaboration with the LPSK. However, handling the case faces challenges such as difficulty identifying the perpetrator due to fake accounts and limited digital forensic resources. The Lhokseumawe City Police's efforts to protect victims include regular training, public education, providing online complaint channels to ensure victims' privacy, and planning the establishment of a special cyber team to strengthen the handling of digital crimes in a more targeted manner.

The recommendation is for the police to continue enhancing and strengthening the socialization of legal protection for victims of the distribution of pornographic photos and videos to ensure that the handling of similar cases is more effective.

Keywords: Legal Protection, Victims, Photos, Videos, Pornography.